

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini dunia dilanda pandemi covid-19 yang menyebar keseluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus *covid-19* pada awal Maret 2020. Telah berbagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam dampak pandemi dari berbagai sektor. Bukan hanya sektor kesehatan, sektor perekonomian juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah seperti menganjurkan warganya agar tetap berada di rumah hingga Pembatasan Berskala Besar atau disingkat dengan PSBB. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis serta dengan adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada jatuhnya perekonomian.

Indonesia saat ini pandemi virus corona merebak pada bulan Februari-Maret ketika banyak perusahaan di Indonesia akan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tahun 2019 (audited). Pada Tahun 2020 merupakan tahun pertama kalinya berlakunya tiga standar akuntansi yaitu PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73 Sewa. Perusahaan tidak akan bisa melakukan kegiatan manajemen laba dan membuat representasi yang tidak tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini. Pandemi ini dapat mengakibatkan dampak

yang luar biasa terhadap perusahaan, entitas harus mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan 2020. Pada paragraf 14 PSAK 8 di nyatakan bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha (Going Concer), jika setelah periode pelaporan di peroleh bukti, bahwa entitas akan di hentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain kecuali melakukan hal tersebut.

Kualitas laporan keuangan adalah suatu informasi yang bisa memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat di asumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Menurut PSAK No 1 (2015) laporan keuangan yaitu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Menurut (Kalumata, Merlyn C.T : Ilat, Ventje : Warongan, 2016) laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Saat ini di Indonesia, laporan keuangan pemerintahan sangat menarik untuk dikaji, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Realitanya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah mempunyai fungsi yang sangat penting. Salah satunya adalah laporan keuangan sebagai

gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya (Ayu, putu cita. Kusumawati, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya (Syifa, 2014). Informasi bisa bermanfaat apabila informasi tersebut bisa mendukung pengambilan keputusan, relevan dan andal. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Ayu et al., 2016).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Kota Pariaman meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 6 (enam) kalinya, dan 4 (empat) kali secara berturut-turut sejak tahun 2015 yang lalu, terhadap Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2018. Opini WTP pertama kali diterima oleh Pemko Pariaman pada Tahun 2008, kemudian kembali menerima pada Tahun 2012, dan sejak Tahun 2015 sampai 2018, selalu menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prestasi ini berkat dukungan dari semua pihak baik Legislatif, OPD, dan masyarakat.

Fenomena yang masih ditemukan kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang harus dimiliki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan yang terjadi, dimana staf/bagian pengelola keuangan dan

penyusunan laporan keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang/belum memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi.

Beberapa faktor yang menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak baik yaitu pertama Pengawasan Intern. Pengawasan Intern adalah salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern dimana dapat berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Pemahaman tentang Peraturan yang harus dilakukan dan prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan dalam hal ini peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang Berbasis Akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual sangat diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, dan untuk memfasilitasi manajemen aset/keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Perubahan peraturan tentang akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi (Modo et al., 2009).

Penelitian ini tidak lah penelitian satu-satunya, namun ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah meneliti sebelumnya. Pertama, penelitian dari (Muzahid & Lhokseumawe, 2004) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Aceh Utara”. Dalam penelitian tersebut variabel bebasnya menggunakan Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah

menggunakan variabel bebasnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern.

Penelitian yang kedua yaitu (Kalumata, Merlyn C.T: Ilat, Ventje: Warongan, 2016) yang berjudul “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara “. Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel bebas Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel bebas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Pengendalian Intern.

Penelitian yang ketiga yaitu (Yuliani, Nur Laila : Rahmawati, 2016) yang berjudul “ Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. Dalam penelitian tersebut menggunakan kuesioner pada Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan kuesioner pada Pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD).

Untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, pemerintah merivisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang Berbasis Akrua. Penerapan akuntansi berbasis akrua sangat di perlukan untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih akuntabel dan transparan, dan menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya selalu

mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti bisa dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut diungkapkan dan disajikan secara berkualitas dan wajar. Ada 4 opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Yuliani, Nur Laila : Rahmawati, 2016). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemakai yaitu, pemakai laporan keuangan pemerintah maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi adalah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal (manajemen asset), meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan belanja (biaya) bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, , tetapi pada saat transaksi terjadi (Nadir, 2017).

Laporan keuangan yang pemerintah daerah yang baik juga sangat ditentukan seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki pemerintah daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidak akwatan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Pengendalian intern yaitu suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal sangat berperan penting dalam melindungi sumber daya organisasi baik yang tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual) maupun tidak berwujud (seperti mesin dan lahan) dan mendeteksi dan mencegah penggelapan. Tujuan pengendalian internal adalah untuk menjamin manajemen organisasi atau entitas atau perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan, laporan keuangan yang di hasilkan perusahaan dapat dipercaya dan relevan, dan kegiatan perusahaan sejalan dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian intern bisa menyediakan informasi tentang bagaimana cara menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan dan juga menyediakan informasi yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Akuntansi Berbasis Akrua adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi perusahaan atau entitas dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam sebuah laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas dibayarkan atau diterima. Dalam Akuntansi Berbasis Akrua, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Salah satu studi yang dilakukan oleh IFAC *Public Sector Committee*

(2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Adanya pelaporan berbasis akrual, pemakai dapat mengidentifikasi bagaimana Pemerintah mendanai kegiatannya tersebut sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya dan mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya dan mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas tentu membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dan dapat memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Sumber Daya Manusia adalah faktor yang sangat penting untuk terciptanya laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien dalam pekerjaannya dan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan merencanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Tujuan dari Pengembangan Sumber Daya Manusia ialah meningkatkan komitmen karyawan dan mengurangi turn over dan absensi, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia bisa mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta

memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Pariaman”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi suatu masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua masih menjadi kendala dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
2. Membuktikan masih terdapat pegawai penatausaha keuangan yang belum memenuhi kompetensi Sumber Daya Manusia, sehingga menjadi kendala dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
3. Masih rendahnya kesadaran etika karyawan pada pemerintahan kota Pariaman , sehingga dapat mengakibatkan perilaku karyawan menjadi tidak etis apabila dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak pada diri karyawan.
4. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidak akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

5. Suatu pengendalian internal yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kualitas laporan keuangan.
6. Laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Masih rendahnya kesadaran etika karyawan pada pemerintahan kota Pariaman , sehingga dapat mengakibatkan perilaku karyawan menjadi tidak etis apabila dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak pada diri karyawan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis hanya akan membahas mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Alasan pembatasan masalah ini karena hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah memberikan pengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisis data. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang Akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya pegawai bidang keuangan instansi pemerintah daerah.

Dan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.